

Menjaga Multiplier Effect Pembangunan Desa sebagai Instrumen Pemerataan Ekonomi Nasional

Maintaining the Multiplier Effect of Village Development as an Instrument of National Economic Equalization

Achmat Subekan¹

¹Pusdikat Anggaran dan Perbendaharaan, BPPK, Kementerian Keuangan, Indonesia; Email: achmatsubekan@gmail.com

Azwar²

²Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia; Email: azwar@stiba.ac.id

Article History

Received : 2025-10-01

Revised : 2025-10-20

Accepted: 2025-10-30

Published: 2025-11-01

Keywords:

rural development, multiplier effect, local economic empowerment, village governance, social capital

Corresponding author:

achmatsubekan@gmail.com

Paper type:

Research paper



**POLITEKNIK WAHDAH
ISLAMIYAH MAKASSAR**

Program Studi Manajemen
Keuangan Sektor Publik,
Politeknik Wahdah Islamiyah

Abstract

This study aims to analyze the dynamics of the Multiplier Effect in rural development in Indonesia by examining how cascading economic impacts emerge and are sustained at the village level. Employing a qualitative-descriptive approach, the research explores the institutional, social, and economic interactions that shape the distribution and sustainability of the Multiplier Effect. Data were collected through direct observations and an analysis of official documents, including village budgets and development planning reports. The findings indicate that the Multiplier Effect does not arise automatically from physical development activities but is generated through strategic management of local economic circulation, the strengthening of social capital, and effective village governance. The study further reveals that villages capable of directing development spending toward local procurement, human resource empowerment, and institutional capacity-building tend to produce a more sustainable Multiplier Effect. Conversely, economic leakages, weak governance, and limited community participation serve as major obstacles to long-term sustainability. The study concludes that reinforcing the Multiplier Effect requires integrated strategies encompassing local procurement policies, capacity enhancement, institutional strengthening, and regulatory support. Such efforts are essential to ensure that rural development contributes meaningfully to local economic resilience and the equitable distribution of national welfare.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *Multiplier Effect* dalam pembangunan desa di Indonesia dengan menelaah bagaimana dampak ekonomi berantai muncul dan dipertahankan pada tingkat desa. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif, penelitian ini mengeksplorasi interaksi kelembagaan, sosial, dan ekonomi yang membentuk distribusi serta keberlanjutan *Multiplier Effect*. Data diperoleh melalui observasi langsung dan analisis dokumen resmi seperti anggaran desa dan dokumen perencanaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa *Multiplier Effect* tidak muncul secara otomatis dari aktivitas pembangunan fisik, tetapi terbentuk melalui

pengelolaan perputaran ekonomi yang strategis, penguatan modal sosial, dan tata kelola desa yang efektif. Temuan penelitian juga mengungkapkan bahwa desa yang mampu mengarahkan belanja pembangunan pada pengadaan berbasis lokal, pemberdayaan sumber daya manusia, dan penguatan kapasitas kelembagaan cenderung menghasilkan *Multiplier Effect* yang lebih berkelanjutan. Sebaliknya, kebocoran ekonomi, lemahnya tata kelola, dan rendahnya partisipasi masyarakat menjadi faktor penghambat keberlanjutan manfaat jangka panjang. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penguatan *Multiplier Effect* memerlukan strategi terpadu yang mencakup kebijakan pengadaan lokal, peningkatan kapasitas, penguatan kelembagaan, dan dukungan regulasi. Upaya tersebut penting untuk memastikan bahwa pembangunan desa berkontribusi secara signifikan terhadap ketahanan ekonomi lokal dan pemerataan kesejahteraan nasional.

Copyright @ 2025 Authors.

Cite this article:

Subekan, A., Azwar. (2025). Menjaga *Multiplier Effect* Pembangunan Desa sebagai Instrumen Pemerataan Ekonomi Nasional. *AMANAH: Jurnal Manajemen Keuangan Sektor Publik*, 1(1), 60-73. <https://journal.uwais.ac.id/index.php/amanah/article/view/12>.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

1. Pendahuluan

Pembangunan merupakan mandat konstitusional yang diarahkan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat secara merata (Rapanna & Sukarno, 2017). Selama beberapa dekade, pengukuran keberhasilan pembangunan nasional seringkali dipusatkan pada indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi dan peningkatan Produk Domestik Bruto (PDB). Meskipun indikator tersebut penting, pendekatan yang terlalu berorientasi pada pertumbuhan (*growth-oriented development*) terbukti tidak selalu mampu menjamin pemerataan kesejahteraan, terutama pada wilayah pedesaan yang selama ini menjadi basis demografis dan ekonomi nasional (Tangkumahat et al., 2017). Dalam konteks ini, agenda pembangunan desa memegang peranan strategis sebagai instrumen pemerataan yang dapat mendorong daya ungkit pembangunan dari tingkat lokal ke tingkat nasional.

Secara teoritik maupun empiris, pembangunan desa diyakini memiliki *Multiplier Effect* yang lebih luas dibandingkan pembangunan yang terkonsentrasi di perkotaan. Investasi pada infrastruktur dasar, layanan publik, ekonomi produktif, dan penguatan kelembagaan desa dapat menciptakan rangkaian efek berganda berupa peningkatan aktivitas ekonomi lokal, perluasan kesempatan kerja, pengurangan kemiskinan, dan peningkatan kualitas hidup masyarakat desa (Ragilliya & Digidwiseiso, 2023). Namun demikian, berbagai kajian menunjukkan bahwa *Multiplier Effect* tersebut tidak selalu tercapai secara optimal akibat lemahnya tata kelola anggaran desa, rendahnya kapasitas perencanaan pembangunan,

ketidaktepatan prioritas program, dan minimnya pengawasan serta partisipasi masyarakat (Setyawan, 2023). Kondisi ini berpotensi menyebabkan kebocoran manfaat pembangunan serta terjadinya ketimpangan internal desa.

Urgensi kajian ini terletak pada kebutuhan untuk menjaga, menguatkan, dan memastikan keberlanjutan *Multiplier Effect* pembangunan desa, terutama setelah satu dekade implementasi kebijakan Dana Desa di Indonesia. Berbagai penelitian sebelumnya telah menyoroti kontribusi signifikan Dana Desa terhadap penurunan angka kemiskinan, pembangunan infrastruktur dasar, dan peningkatan aktivitas ekonomi lokal di Indonesia. Salah satu aspek kunci dari kontribusi Dana Desa adalah dalam pembangunan infrastruktur vital seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum. Penelitian oleh Supriadin & Wardan (2024) menunjukkan bahwa optimalisasi penggunaan Dana Desa dapat meningkatkan kualitas infrastruktur dasar, yang secara signifikan berkontribusi pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, meskipun ada kendala seperti kapasitas sumber daya manusia yang terbatas dan kurangnya transparansi dalam pengelolaan dana. Selain itu, penelitian oleh Rahman & Arifin (2022) menemukan bahwa alokasi dana yang baik dapat mengurangi tingkat kemiskinan hingga 30,1% dengan meningkatkan modal sosial dan kapasitas ekonomi lokal.

Pembangunan infrastruktur bukan hanya tentang pembangunan fisik, tetapi juga menciptakan lapangan kerja. Penelitian oleh Diantoro (2022) menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam setiap tahapan pembangunan, seperti perencanaan dan pemeliharaan jalan desa, yang memungkinkan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat setempat. Hal ini sejalan dengan temuan oleh Fatimah & Deviani (2024) yang menunjukkan bahwa alokasi Dana Desa memiliki pengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi yang pada gilirannya menurunkan angka kemiskinan. Dana Desa juga berperan dalam pengembangan ekonomi lokal melalui pemberdayaan kegiatan ekonomi produktif. Dalam konteks ini, penelitian oleh Kumalasari et al. (2023) menunjuk pada pentingnya partisipasi aktif masyarakat dalam perencanaan strategis pembangunan, yang berkaitan erat dengan efektivitas dalam pengelolaan Dana Desa. Oleh karena itu, perlu adanya rekomendasi untuk peningkatan pelatihan dan pengawasan terhadap penggunaan Dana Desa, agar manfaatnya dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat (Saraswati, 2024).

Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut lebih berfokus pada *output* fisik atau aspek administratif, bukan pada mekanisme bagaimana *Multiplier Effect* terbentuk, terdistribusi, dan dipertahankan dalam jangka panjang. Selain itu, belum banyak kajian yang secara khusus membahas faktor-faktor penyebab terjadinya pelemahan *Multiplier Effect* serta strategi mempertahankannya di tengah perubahan sosial-ekonomi desa.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji praktik pembangunan desa di Indonesia, masih terdapat sejumlah kesenjangan ilmiah (*research gap*) yang perlu diperhatikan. Pertama, studi-studi sebelumnya umumnya membahas pembangunan desa dari sisi *output* fisik, tata kelola anggaran, atau dampak sosial-ekonomi secara parsial, sehingga kajian yang secara komprehensif menempatkan pembangunan desa dalam kerangka *Multiplier Effect* masih sangat terbatas. Kedua, meskipun Dana Desa telah

diimplementasikan selama hampir satu dekade, penelitian mengenai keberlanjutan *Multiplier Effect* pasca-implementasi kebijakan tersebut masih minim, terutama dalam menelaah apakah efek berganda yang muncul dapat dipertahankan dalam jangka panjang. Ketiga, sebagian besar kajian masih bersifat sektoral dan belum mengintegrasikan analisis kelembagaan, sosial, dan ekonomi secara utuh, padahal efektivitas *Multiplier Effect* sangat dipengaruhi oleh interaksi ketiga aspek tersebut. Kesenjangan inilah yang menjadikan penelitian tentang *Multiplier Effect* pembangunan desa sebagai agenda akademik yang relevan dan penting untuk diisi.

Sejalan dengan kesenjangan tersebut, penelitian ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan utama. Pertama, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika *Multiplier Effect* pembangunan desa di Indonesia dengan menelaah bagaimana dampak berganda tersebut terbentuk dan terdistribusi di tingkat lokal. Kedua, penelitian ini bermaksud mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat keberlanjutan *Multiplier Effect*, baik yang berasal dari aspek kelembagaan, kapasitas sumber daya manusia, struktur ekonomi desa, maupun partisipasi masyarakat. Ketiga, penelitian ini berupaya merumuskan rekomendasi strategis yang dapat menjadi acuan bagi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintah desa dalam menjaga, memperkuat, serta mengoptimalkan *Multiplier Effect* pembangunan desa agar mampu berkontribusi secara signifikan terhadap pemerataan kesejahteraan nasional.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada pendekatan analitis yang menempatkan *Multiplier Effect* bukan hanya sebagai konsekuensi ekonomi, tetapi sebagai hasil dari interaksi antara kebijakan, tata kelola, kapasitas institusi desa, dan partisipasi masyarakat. Penelitian ini juga menawarkan kerangka konseptual untuk menilai keberlanjutan *Multiplier Effect* dari pembangunan desa yang selama ini belum banyak dibahas dalam literatur.

Secara praktis, penelitian ini berkontribusi pada penguatan kebijakan pembangunan desa yang lebih efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Selain itu, temuan penelitian ini diharapkan dapat memperkaya diskursus akademik mengenai pembangunan berbasis komunitas dan peran desa sebagai episentrum pemerataan ekonomi nasional.

2. Tinjauan Pustaka

Struktur pemerintahan di Indonesia memiliki beberapa tingkatan. Hal ini sesuai dengan pembagian wilayah Indonesia menjadi beberapa daerah (provinsi dan kabupaten/kota). Bahkan Indonesia masih memiliki tingkatan pemerintahan yang lebih kecil, yakni pemerintah desa. Pemerintah desa merupakan bentuk pemerintahan yang telah lama ada sebelum diproklamasikannya kemerdekaan Republik Indonesia. Desa telah memiliki aset/kekayaan desa, hukum adat, dan mekanisme penentuan pimpinannya (kepala desa atau dengan sebutan lain). Pengakuan negara terhadap keberadaan desa tertuang dalam Pasal 18A ayat (2) UUD 1945 yang berbunyi:

“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.”

Dewasa ini, undang-undang tentang desa telah diterbitkan, yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Peraturan perundangan pelaksanaan dibawahnya juga telah diterbitkan mulai dari peraturan pemerintah hingga peraturan menteri yang mengatur tentang desa. Tidak ketinggalan pula peraturan daerah yang telah banyak diterbitkan oleh kabupaten/kota untuk menindaklanjuti Undang-Undang Tentang Desa dan peraturan lain di atasnya.

Undang-Undang Tentang Desa tersebut di atas telah mendorong intensitas pembangunan desa dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dalam undang-undang tersebut termuat ketentuan mengenai pembangunan desa dan keuangan desa. Hal ini menuntut desa ikut berperan aktif dalam proses pembangunan nasional. Pemerintah pusat dan daerah pun konsisten untuk mendukung pembangunan desa melalui *transfer* keuangan kepada pemerintah desa berupa Dana Desa (dari APBN) dan Alokasi Dana Desa (dari APBD Kabupaten/Kota). Hal ini semakin melengkapi modal yang dimiliki desa untuk berperan aktif dalam meningkatkan kesejahteraan warganya. Regulasi pembangunan desa telah ada, demikian juga dengan sumber pendanaan yang digunakan untuk mendukung pembangunan.

Pembangunan desa telah membuat masyarakat desa ikut berperan aktif dalam pembangunan nasional. Desa juga menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan melaksanakannya guna memenuhi kebutuhan bersama. Kepala desa bersama perangkat desa lainnya dituntut untuk memahami dan melaksanakan berbagai peraturan perundangan terkait dengan pengelolaan keuangan desa dalam rangka pembangunan desa tersebut. Mereka harus mau belajar guna menyesuaikan diri dengan tuntutan peraturan yang berlaku. Mereka juga harus siap memberikan catatan/data/bukti apabila pengelolaan keuangan dan pembangunan yang dilakukannya diaudit oleh pejabat atau instansi terkait.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif yang bertujuan memahami secara mendalam dinamika *Multiplier Effect* pembangunan desa serta faktor-faktor yang memengaruhi keberlanjutannya (Handoko et al., 2024). Pendekatan ini dipilih karena fenomena pembangunan desa tidak hanya berkaitan dengan angka-angka ekonomi, tetapi juga melibatkan interaksi kelembagaan, perilaku sosial, dan proses pengambilan keputusan yang memerlukan pemahaman kontekstual.

Data penelitian diperoleh melalui observasi langsung dilakukan untuk melihat realitas empiris kegiatan pembangunan dan respons masyarakat terhadapnya. Penelitian juga memanfaatkan dokumen resmi—meliputi APBDes, RKPDes, RPJMDes, laporan realisasi anggaran, dan data statistik—untuk memperkuat analisis dan memberikan gambaran objektif mengenai arah dan hasil pembangunan desa.

Seluruh data yang terkumpul dianalisis menggunakan model Miles, Huberman, dan Saldaña, yang meliputi proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan secara bertahap (Miles & Huberman, 1994). Analisis dilakukan secara induktif, sehingga pola dan tema utama tentang *Multiplier Effect* dibangun berdasarkan temuan lapangan, bukan asumsi awal. Untuk menjaga keabsahan temuan, penelitian menerapkan berbagai teknik verifikasi seperti triangulasi sumber dan metode, serta penyusunan catatan proses penelitian secara sistematis. Dengan pendekatan ini, penelitian diharapkan mampu menghasilkan pemahaman yang komprehensif dan mendalam mengenai mekanisme terbentuknya *Multiplier Effect* pembangunan desa serta kondisi-kondisi yang menentukan keberlanjutannya.

4. Hasil dan Pembahasan

Dinamika *Multiplier Effect* pembangunan desa di Indonesia tidak hanya tercermin dari output fisik berupa infrastruktur maupun kegiatan pemberdayaan masyarakat yang tercatat dalam APBDes, tetapi juga dari rangkaian dampak berganda yang mengalir melalui aktivitas ekonomi lokal, peningkatan kapasitas masyarakat, dan penguatan kohesi sosial desa (Tangkumahat et al., 2017). Dalam praktiknya, pembangunan desa selama ini lebih banyak diukur berdasarkan terwujudnya fasilitas publik—seperti jalan, jembatan, balai desa, irigasi, dan pasar—yang secara administratif memenuhi indikator kinerja. Namun, sejatinya *Multiplier Effect* yang muncul di balik proses pembangunan tersebut sering kali tidak terdokumentasi, kurang dipahami, bahkan tidak dikelola secara strategis oleh pemerintah desa.

4.1. Dinamika Pembentukan dan Distribusi *Multiplier Effect* di Desa

Dinamika pembentukan *Multiplier Effect* dalam pembangunan desa merupakan proses yang kompleks dan multidimensional, yang tidak hanya dipengaruhi oleh aliran dana pembangunan, tetapi juga oleh struktur sosial, kapasitas kelembagaan, serta kualitas interaksi antar-aktor di tingkat lokal. Secara umum, *Multiplier Effect* di desa terbentuk melalui dua mekanisme besar yang saling berkaitan dan saling memperkuat.

Pertama adalah mekanisme ekonomi langsung, yang muncul dari perputaran uang desa dalam proses pembangunan. Ketika pembangunan infrastruktur atau kegiatan pemberdayaan dilaksanakan, desa membutuhkan berbagai input—mulai dari bahan bangunan, alat kerja, tenaga ahli, hingga jasa pendukung. Apabila pemerintah desa secara sadar memprioritaskan penggunaan bahan dan jasa dari pelaku ekonomi lokal, maka uang yang dikeluarkan dari APBDes tidak hanya menghasilkan output fisik berupa jalan, jembatan, atau sarana publik lainnya, tetapi juga memicu aliran pendapatan baru bagi masyarakat desa. Pendapatan ini kemudian dibelanjakan kembali untuk kebutuhan sehari-hari, memutar roda konsumsi rumah tangga, dan memicu serangkaian transaksi ekonomi lokal lainnya. Alur ini membentuk efek berganda (*multiplier*) yang bersifat kumulatif, di mana satu kegiatan pembangunan dapat menghasilkan berbagai dampak ekonomi turunan seperti meningkatnya omzet toko bangunan kecil, bergeraknya usaha makanan rumah tangga yang menyediakan konsumsi

untuk pekerja proyek, hingga munculnya peluang kerja informal di sekitar lokasi pembangunan.

Selanjutnya, *Multiplier Effect* tidak hanya terjadi pada tahap pelaksanaan, tetapi juga pada tahap pasca-pembangunan ketika aset desa sudah berfungsi secara penuh. Infrastruktur yang dibangun menciptakan penurunan biaya transportasi, peningkatan akses pasar, dan percepatan mobilitas tenaga kerja, yang pada akhirnya memperluas jangkauan usaha mikro dan memungkinkan tumbuhnya aktivitas ekonomi baru. Artinya, *Multiplier Effect* bersifat berjangka panjang jika aset yang dibangun mampu menciptakan peluang ekonomi lebih luas setelah selesai digunakan.

Kedua adalah mekanisme sosial-psikologis, yang memainkan peran signifikan dalam menjaga keberlanjutan *Multiplier Effect*. Keterlibatan masyarakat dalam proses pembangunan menghasilkan rasa memiliki (*sense of ownership*) yang kuat terhadap aset desa. Ketika masyarakat terlibat sebagai tenaga kerja, penyedia jasa, pembeli bahan, atau bahkan sekadar sebagai pihak yang dilibatkan dalam perencanaan, mereka memandang pembangunan sebagai bagian dari usaha kolektif, bukan semata-mata program pemerintah. Kondisi ini memperkuat kohesi sosial dan menumbuhkan budaya gotong royong dalam memelihara aset desa.

Lebih jauh, partisipasi aktif warga desa dalam pembangunan terbukti meningkatkan kapasitas sosial (*social capital*) berupa kepercayaan, koordinasi, dan jaringan kerja antarwarga. Proses ini menciptakan *Multiplier Effect* nonmaterial yang tidak kalah penting: meningkatnya kepercayaan diri warga dalam mengembangkan usaha, tumbuhnya solidaritas dalam menjaga aset publik, serta meningkatnya kemampuan untuk berkolaborasi dalam kegiatan pembangunan berikutnya. Dalam jangka panjang, modal sosial yang kuat memperbaiki efektivitas pemerintahan desa karena kebijakan pembangunan menjadi lebih responsif dan mendapat legitimasi sosial yang lebih tinggi.

Distribusi *Multiplier Effect*, sebagaimana ditunjukkan oleh penelitian ini, sangat dipengaruhi oleh pola pengambilan keputusan pemerintah desa dalam memanfaatkan sumber daya lokal. Desa yang secara konsisten memprioritaskan tenaga kerja lokal, memberikan ruang akses bagi pelaku usaha desa, dan melibatkan masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan terbukti mampu mempertahankan perputaran uang di tingkat desa. Sebaliknya, desa yang menyerahkan sebagian besar kegiatan pembangunan kepada pihak luar—baik berupa penyedia material, kontraktor, maupun tenaga ahli—mengalami kebocoran ekonomi (*economic leakage*), di mana dana desa mengalir kembali ke wilayah perkotaan. Kebocoran ini tidak hanya mengurangi *Multiplier Effect*, tetapi juga memperlemah kemampuan desa untuk membangun basis ekonomi lokal yang mandiri.

Selain itu, distribusi *Multiplier Effect* bersifat tidak merata jika desa tidak memiliki kebijakan yang jelas dalam mengelola pembangunan berbasis sumber daya lokal. Dalam beberapa kasus, keputusan untuk membeli material dari luar desa diambil karena alasan praktis, misalnya keterbatasan stok atau kualitas produk lokal. Namun, minimnya strategi pengembangan rantai pasok lokal menyebabkan desa gagal membangun ekosistem ekonomi yang berkelanjutan. Di sinilah peran pemerintah desa menjadi krusial:

Multiplier Effect hanya dapat berlangsung secara optimal apabila desa mampu menghubungkan pembangunan fisik dengan pembangunan ekonomi masyarakat secara terencana.

Oleh karena itu, dinamika pembentukan dan distribusi *Multiplier Effect* di desa menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak cukup dinilai dari kelengkapan infrastruktur semata. Pembangunan yang berorientasi pada pemberdayaan ekonomi lokal, pelibatan masyarakat, dan pemanfaatan modal sosial merupakan fondasi utama untuk mengubah pembangunan desa dari sekadar kegiatan administratif menjadi instrumen pemerataan ekonomi yang efektif dan berkelanjutan.

4.2. Faktor Pendorong dan Penghambat Keberlanjutan *Multiplier Effect*

Sejumlah faktor pendorong dapat memperkuat *Multiplier Effect* pembangunan desa. Pertama, kapasitas kelembagaan desa yang baik—ditandai oleh perencanaan yang partisipatif, tata kelola keuangan yang transparan, dan pengambilan keputusan yang responsif—berkorelasi positif dengan keberlanjutan *Multiplier Effect*. Kedua, ketersediaan sumber daya manusia lokal dengan keterampilan teknis maupun sosial menjadi modal utama dalam menjaga agar manfaat pembangunan tetap berputar di desa. Ketiga, struktur ekonomi desa yang memiliki basis usaha lokal dan jaringan produsen bahan bangunan memungkinkan desa mengoptimalkan belanja pembangunan tanpa harus bergantung pada pemasok luar daerah.

Pertama, kapasitas kelembagaan desa yang kuat menjadi fondasi utama. Desa dengan perencanaan berbasis data, mekanisme musyawarah yang inklusif, serta sistem akuntabilitas yang transparan cenderung mampu menentukan prioritas pembangunan yang strategis dan berdampak luas. Kelembagaan yang adaptif juga mampu merespons dinamika kebutuhan masyarakat, termasuk menyesuaikan proyek pembangunan agar selaras dengan potensi lokal. Hal ini berkontribusi pada kelangsungan manfaat pembangunan, bukan hanya pada saat proyek berlangsung, tetapi juga setelahnya.

Kedua, ketersediaan dan kualitas sumber daya manusia lokal turut memengaruhi kekuatan *Multiplier Effect*. SDM yang memiliki kompetensi teknis (seperti tukang, operator alat, dan penyedia jasa) serta keterampilan sosial (seperti manajerial, fasilitasi, dan kewirausahaan) akan memastikan bahwa belanja pembangunan dapat diserap oleh tenaga kerja desa sendiri. Keberadaan SDM lokal yang siap pakai mendorong transfer pengetahuan, peningkatan kapasitas warga, serta tumbuhnya kepercayaan diri kolektif. Hal ini menjadi modal sosial penting dalam menjaga kesinambungan aktivitas ekonomi desa.

Ketiga, struktur ekonomi desa dan keberadaan basis usaha lokal yang memadai menjadi faktor penguat *Multiplier Effect*. Desa yang memiliki jaringan produsen bahan bangunan, pengusaha lokal, UMKM, dan rantai pasok internal akan mampu mempertahankan belanja pembangunan di dalam desa, sehingga uang terus beredar dan menciptakan efek pengganda yang lebih panjang. Dalam konteks ini, pembangunan tidak hanya menciptakan infrastruktur, tetapi juga menghidupkan ekosistem ekonomi lokal yang saling terhubung.

Namun demikian, sejumlah faktor penghambat juga dapat menghalangi keberlanjutan *Multiplier Effect*.

Pertama, lemahnya kelembagaan desa sering kali menjadi akar persoalan utama. Desa yang tata kelolanya masih bersifat administratif—lebih berorientasi pada pemenuhan prosedur daripada optimalisasi dampak—cenderung mengeksekusi pembangunan secara mekanis dan rutinitas. Minimnya kapasitas dalam melakukan analisis kebutuhan, pemetaan potensi, serta evaluasi dampak menyebabkan pembangunan tidak diarahkan pada sektor-sektor yang memiliki efek berganda yang kuat.

Kedua, rendahnya kapasitas teknis tenaga kerja dan pelaku usaha lokal membuat desa harus bergantung pada tenaga profesional dari luar, baik untuk pekerjaan konstruksi maupun pengadaan barang. Ketika sebagian besar anggaran pembangunan mengalir keluar desa, potensi *Multiplier Effect* otomatis melemah. Ketidakmerataan keterampilan ini juga menghambat munculnya inovasi lokal serta memperlambat diversifikasi ekonomi.

Ketiga, struktur ekonomi desa yang bersifat subsisten—ditandai oleh minimnya usaha produktif, lemahnya rantai pasok, serta keterbatasan akses pasar—menyebabkan pembangunan sulit memberikan efek berganda yang kuat. Pembangunan fisik tidak otomatis menghidupkan aktivitas ekonomi jika tidak disertai basis usaha lokal yang mampu memanfaatkannya.

Keempat, rendahnya pemahaman aparatur desa mengenai konsep *Multiplier Effect* menyebabkan strategi belanja pembangunan tidak diarahkan untuk memaksimalkan perputaran uang di desa. Keputusan pengadaan yang tidak mempertimbangkan produsen lokal, perekrutan tenaga kerja yang tidak mengutamakan warga desa, atau penentuan proyek yang kurang relevan dengan struktur ekonomi lokal merupakan beberapa contoh praktik yang melemahkan *Multiplier Effect*.

Secara umum, faktor pendorong dan penghambat tersebut menunjukkan bahwa *Multiplier Effect* bukanlah fenomena yang terjadi secara otomatis. Ia membutuhkan ekosistem kelembagaan yang kuat, kapasitas SDM yang memadai, serta struktur ekonomi lokal yang responsif dan adaptif. Tanpa ketiga elemen tersebut, manfaat pembangunan desa akan bersifat jangka pendek dan mudah hilang setelah proyek selesai.

4.3. Strategi Mengoptimalkan dan Menjaga Keberlanjutan *Multiplier Effect*

Upaya mengoptimalkan *Multiplier Effect* tidak hanya memerlukan alokasi Dana Desa yang besar, tetapi juga memerlukan desain kebijakan yang presisi, kapasitas kelembagaan yang memadai, dan orkestrasi kolaboratif antara pemerintah desa, masyarakat, dan pemerintah supradesa. Berdasarkan temuan penelitian, terdapat sejumlah strategi kunci yang dapat ditempuh untuk memastikan bahwa efek berganda pembangunan desa tidak hanya muncul pada tahap awal proyek, tetapi juga berkelanjutan dan menciptakan transformasi ekonomi jangka panjang.

Pertama, penerapan kebijakan pengadaan berbasis lokal (*local procurement policy*) menjadi prasyarat utama dalam mempertahankan perputaran dana di tingkat desa. Melalui kebijakan ini, desa mengutamakan pembelian bahan bangunan dari produsen lokal, pemanfaatan jasa usaha lokal, dan perekrutan tenaga kerja desa. Pengadaan lokal bukan hanya

menjaga agar uang tidak keluar dari desa, tetapi juga mendorong tumbuhnya ekonomi lokal melalui peningkatan pendapatan, ekspansi usaha kecil, dan terbentuknya rantai pasok desa yang lebih kokoh. Dalam jangka panjang, local procurement menjadi instrumen strategis untuk mendorong kemandirian ekonomi desa.

Kedua, strategi penguatan kapasitas sumber daya manusia desa melalui pelatihan teknis, sertifikasi kompetensi, pendampingan manajerial, hingga pembinaan kewirausahaan menjadi kunci kesinambungan *Multiplier Effect*. Tenaga kerja lokal yang kompeten mampu mengantikan ketergantungan desa pada tenaga profesional dari luar. Hal ini tidak hanya menjaga perputaran dana, tetapi juga meningkatkan kualitas pekerjaan fisik, memperluas kesempatan kerja, dan mendorong transfer keahlian antarwarga. Penguatan SDM juga berperan meningkatkan literasi ekonomi, inovasi lokal, dan keterampilan sosial seperti kepemimpinan, negosiasi, dan kolaborasi.

Ketiga, peningkatan kapasitas kelembagaan desa berperan sebagai fondasi strategis untuk menciptakan *Multiplier Effect* yang berkelanjutan. Perencanaan berbasis data, mekanisme partisipatif, integrasi potensi lokal dalam RPJMDes dan APBDes, serta tata kelola keuangan yang akuntabel memastikan bahwa pembangunan desa diarahkan pada kegiatan yang paling produktif secara ekonomi. Kelembagaan yang kuat juga memungkinkan desa melakukan evaluasi dampak, menyesuaikan kebijakan dengan dinamika pasar, serta mengarahkan belanja desa pada sektor-sektor yang memberikan efek berganda paling tinggi.

Keempat, dukungan pemerintah daerah dan pusat melalui regulasi dan insentif merupakan prasyarat memperkuat daya gerak desa. Insentif berbasis kinerja ekonomi lokal—misalnya reward bagi desa yang mampu mempertahankan porsi pengadaan lokal, meningkatkan serapan tenaga kerja lokal, atau menumbuhkan usaha produktif masyarakat—dapat mendorong inovasi kebijakan di tingkat desa. Pemerintah daerah juga dapat menyediakan layanan pendampingan teknis, memfasilitasi kerja sama antar desa, serta memastikan harmonisasi kebijakan yang mendukung ekonomi lokal.

Secara umum, *Multiplier Effect* tidak akan muncul secara otomatis hanya dengan membangun infrastruktur. Efek berganda merupakan hasil dari sinergi antara kebijakan yang tepat, praktik tata kelola yang cermat, dan kesadaran kolektif masyarakat dalam mendukung penggunaan sumber daya lokal. Desa yang mampu mengintegrasikan aspek kelembagaan, sosial, dan ekonomi secara simultan terbukti memiliki tingkat *Multiplier Effect* yang lebih tinggi dan lebih tahan lama. Oleh karena itu, memperkuat *Multiplier Effect* merupakan agenda strategis untuk memastikan bahwa Dana Desa benar-benar berfungsi sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan nasional, bukan sekadar alat pembangunan fisik yang bersifat jangka pendek.

Tabel 1. Strategi Penguatan dan Keberlanjutan *Multiplier Effect* Pembangunan Desa

Kategori Strategi	Uraian Strategis	Dampak terhadap <i>Multiplier Effect</i>
1. Kebijakan Pengadaan Berbasis Lokal	<ul style="list-style-type: none"> • Memprioritaskan pembelian material dari produsen lokal. • Mengutamakan tenaga kerja desa dalam proyek pembangunan. • Mengembangkan basis usaha lokal sebagai pemasok utama. 	<ul style="list-style-type: none"> • Menjaga perputaran uang tetap berada di desa. • Meningkatkan pendapatan warga. • Memperkuat rantai ekonomi lokal.
2. Penguatan Kapasitas SDM Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Pelatihan teknis dan sertifikasi kompetensi. • Penguatan manajemen usaha lokal. • Pendampingan berkelanjutan dari mentor profesional. • Perencanaan berbasis data dan partisipatif. 	<ul style="list-style-type: none"> • Mengurangi ketergantungan pada tenaga kerja luar. • Meningkatkan kualitas hasil pembangunan. • Menumbuhkan inovasi dan kewirausahaan lokal. • Belanja desa lebih tepat sasaran.
3. Penguatan Kelembagaan Desa	<ul style="list-style-type: none"> • Transparansi dan akuntabilitas keuangan desa. • Integrasi potensi lokal dalam RPJMDes dan APBDes. 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan lebih relevan dengan kebutuhan dan potensi desa. • Memperpanjang umur ekonomi aset desa.
4. Dukungan Regulasi dan Insentif Supradesa	<ul style="list-style-type: none"> • Skema reward berbasis kinerja ekonomi lokal. • Kebijakan afirmatif untuk pengadaan lokal. • Pendampingan teknis dari pemerintah daerah. 	<ul style="list-style-type: none"> • Memperkuat motivasi desa dalam inovasi ekonomi. • Mendorong kompetisi sehat antar desa. • Mempercepat integrasi pembangunan desa dengan pembangunan daerah.

Sumber: Hasil Olah Data (2025)

5. Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa *Multiplier Effect* pembangunan desa merupakan proses multidimensional yang tidak muncul secara otomatis dari kegiatan pembangunan fisik, tetapi terbentuk melalui interaksi antara mekanisme ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang saling memperkuat. Hasil penelitian menegaskan bahwa pembangunan desa yang hanya berorientasi pada output infrastruktur cenderung gagal memaksimalkan dampak

ekonominya karena perputaran uang dan distribusi manfaat tidak dikelola secara strategis. *Multiplier Effect* yang kuat justru muncul ketika belanja pembangunan diarahkan untuk menggerakkan ekonomi lokal melalui pemanfaatan pelaku usaha desa, tenaga kerja lokal, dan rantai pasok internal. Mekanisme ini tidak hanya menciptakan aliran pendapatan baru bagi masyarakat, tetapi juga memicu aktivitas konsumsi, memperluas peluang kerja, serta menciptakan dampak turunan pada sektor-sektor informal.

Selain mekanisme ekonomi, penelitian ini juga menemukan bahwa modal sosial—seperti keterlibatan masyarakat, rasa memiliki terhadap aset publik, dan kohesi sosial—memegang peranan signifikan dalam menjaga keberlanjutan *Multiplier Effect*. Partisipasi aktif warga dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan meningkatkan kapasitas sosial desa, memperkuat kolaborasi antarwarga, dan membangun legitimasi terhadap pemerintahan desa. Modal sosial ini menjadi pendorong penting agar aset desa tetap dimanfaatkan, dijaga, dan memberi manfaat jangka panjang. Keberlanjutan *Multiplier Effect* sangat dipengaruhi oleh sejumlah faktor pendorong utama, terutama kapasitas kelembagaan desa, kualitas sumber daya manusia lokal, dan struktur ekonomi desa yang didukung oleh basis usaha lokal yang kuat. Desa dengan perencanaan berbasis data, musyawarah yang inklusif, SDM kompeten, dan ekosistem usaha yang produktif terbukti mampu menjaga perputaran dana pembangunan tetap berada di tingkat lokal. Sebaliknya, *Multiplier Effect* melemah ketika desa memiliki kelembagaan yang lemah, ketergantungan tinggi pada tenaga kerja dan penyedia barang dari luar desa, struktur ekonomi subsisten, serta kurangnya pemahaman aparatur desa mengenai konsep *Multiplier Effect*. Kondisi ini menyebabkan kebocoran ekonomi yang signifikan sehingga manfaat pembangunan bersifat jangka pendek dan tidak menumbuhkan kemandirian ekonomi desa.

Oleh karena itu, strategi penguatan *Multiplier Effect* harus dilakukan secara terencana melalui penerapan kebijakan pengadaan berbasis lokal, peningkatan kapasitas SDM desa, penguatan kelembagaan, dan dukungan regulasi supradesa. Desa yang menerapkan keempat strategi tersebut secara konsisten terbukti lebih mampu menghubungkan pembangunan fisik dengan pemberdayaan ekonomi masyarakat. Dengan demikian, *Multiplier Effect* dapat bertahan lebih lama, menciptakan pertumbuhan ekonomi lokal, serta berkontribusi terhadap pemerataan kesejahteraan nasional.

Implikasi, Keterbatasan, dan Saran Penelitian Berikutnya

Temuan penelitian ini memberikan sejumlah implikasi penting bagi berbagai pemangku kepentingan. Bagi pemerintah desa, hasil penelitian menegaskan perlunya perubahan paradigma pembangunan dari orientasi fisik semata menuju orientasi penguatan ekonomi lokal. Kebijakan pembangunan harus dirancang untuk memastikan bahwa setiap rupiah yang dibelanjakan memberikan dampak berantai yang signifikan bagi kegiatan ekonomi desa. Bagi pemerintah daerah dan pusat, penelitian ini menunjukkan pentingnya penyediaan regulasi, pendampingan, dan skema insentif yang mendorong desa mengutamakan belanja lokal serta memperkuat kapasitas kelembagaan. Implikasi akademik penelitian ini juga

cukup kuat, yakni perlunya memasukkan perspektif multidimensional—ekonomi, sosial, dan kelembagaan—ke dalam kajian pembangunan desa, karena Multiplier Effect terbukti hanya muncul secara optimal melalui integrasi ketiga aspek tersebut. Temuan ini turut memberikan kontribusi teoritis dalam memperkaya kajian ekonomi pembangunan, khususnya mengenai bagaimana kebijakan fiskal lokal dapat menciptakan efek pengganda yang berkelanjutan pada konteks pedesaan.

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu dicermati. Pertama, penggunaan pendekatan kualitatif-deskriptif memberikan kedalaman analisis, namun tidak memungkinkan pengukuran kuantitatif atas besaran *Multiplier Effect* secara numerik. Hal ini membuat penelitian belum mampu memberikan estimasi dampak ekonomi secara terukur. Kedua, lokasi penelitian ditentukan secara purposive sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi untuk seluruh desa di Indonesia yang memiliki karakteristik sosial-ekonomi sangat beragam. Ketiga, penelitian ini bergantung pada wawancara dan dokumen administratif desa, sehingga kualitas data dipengaruhi oleh keterbukaan informan dan kelengkapan dokumen. Keempat, penelitian lebih menitikberatkan pada *Multiplier Effect* dari pembangunan fisik, sehingga belum mengelaborasi secara mendalam potensi efek pengganda dari sektor nonfisik seperti pendidikan, kesehatan, atau pengembangan teknologi tepat guna di desa.

Berdasarkan keterbatasan tersebut, terdapat sejumlah saran untuk penelitian mendatang. Pertama, penelitian selanjutnya dapat mengombinasikan pendekatan kualitatif dan kuantitatif (*mixed methods*) untuk menghasilkan pengukuran *Multiplier Effect* yang lebih komprehensif dan terstandar. Kedua, perlu dilakukan penelitian komparatif antarwilayah atau antar-provinsi untuk melihat variasi efektivitas *Multiplier Effect* berdasarkan karakteristik ekonomi, kelembagaan, dan sosial budaya yang berbeda. Ketiga, penelitian di masa depan dapat mengeksplorasi dampak pengganda dari bidang pembangunan nonfisik serta bagaimana investasi pada modal manusia atau inovasi desa digital dapat memperkuat *Multiplier Effect* jangka panjang. Keempat, penelitian longitudinal diperlukan untuk memahami dinamika keberlanjutan *Multiplier Effect* dalam jangka waktu yang lebih panjang, terutama setelah perubahan regulasi atau kebijakan Dana Desa. Kelima, diperlukan pula kajian yang mengembangkan model konseptual atau kerangka evaluasi yang dapat digunakan pemerintah desa untuk memantau efektivitas *Multiplier Effect* secara berkala dan berbasis data.

Daftar Pustaka

- Diantoro, W. (2022). Persepsi Masyarakat Terhadap Keberhasilan Pembangunan Jalan Desa Di Banjarlor Kabupaten Brebes Dengan Menggunakan Analisis Regresi Linear Berganda. *Jurnal Ekonomi Teknologi Dan Bisnis (Jetbis)*, 1(2), 95–115. <https://doi.org/10.57185/jetbis.v1i2.14>
- Fatimah, I. M., & Deviani, D. (2024). Pengaruh Alokasi Dana Desa (ADD) terhadap Tingkat Kemiskinan Masyarakat Desa Melalui Pertumbuhan Ekonomi Sebagai Variabel Intervening. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 6(1), 314–331. <https://scispace.com/pdf/pengaruh-alokasi-dana-desa-add-terhadap-tingkat-kemiskinan-1qk5gmyufs.pdf>.

- Handoko, Y., Wijaya, H. A., & Lestari, A. (2024). *Metode Penelitian Kualitatif Panduan Praktis untuk Penelitian Administrasi Pendidikan*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Kumalasari, I., Akbariah, L., Natasha, C. E., & Nashihah, D. (2023). Mengukur Sentimen Asn: Tinjauan Kepuasan Asn Terhadap Perencanaan Strategis Dalam Pembangunan Infrastruktur Pemerintah Daerah Di Kabupaten Pamekasan. *Journal of Social and Economics Research*, 5(2), 285–292. <https://doi.org/10.54783/jser.v5i2.134>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook*. SAGE Publications Sage CA: Los Angeles, CA.
- Ragilliya, Y., & Digidwiseiso, K. (2023). Pengelolaan Dan Penggunaan Dana Desa Dalam Upaya Meningkatkan Pembangunan Daerah (Studi Kasus Di Kabupaten Pacitan). *Management Studies and Entrepreneurship Journal (MSEJ)*, 4(4), 4435–4450. <https://doi.org/https://doi.org/10.37385/msej.v4i5.2613>.
- Rahman, M. D. F., & Arifin, K. K. (2022). The Effect of Village Funds on Social Capital in Rural Poverty: PLS Sem. *Jurnal Ekonomi Manajemen Akuntansi Keuangan Bisnis Digital*, 1(2), 81–96. <https://doi.org/10.58222/jemakbd.v1i2.119>
- Rapanna, P., & Sukarno, Z. (2017). *Ekonomi pembangunan* (Vol. 1). Sah Media.
- Saraswati, Y. (2024). Pemanfaatan Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Desa Di Desa Sumberejo, Kabupaten Wonogiri. *Jurnal Intervensi Sosial Dan Pembangunan (Jisp)*. <https://doi.org/10.30596/jisp.v5i1.16000>
- Setyawan, D. (2023). Pengaruh Dana Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa Terhadap Tingkat Kemiskinan Desa Dengan Pendapatan Asli Daerah Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Ilmu Ekonomi*, 2(3), 19–36. <https://risetekonomi.com/jurnal/index.php/jie/article/view/93/58>.
- Supriadin, S., & Wardan, W. (2024). Efektivitas Pemanfaatan Dana Desa Dalam Meningkatkan Pembangunan Ekonomi Dan Infrastruktur Pedesaan. *Ei*, 1(1), 1–6. <https://doi.org/10.71094/ecoin.v1i1.17>
- Tangkumahat, F. V., Panelewen, V. V. J., & Mirah, A. D. P. (2017). Dampak Program Dana Desa Terhadap Peningkatan Pembangunan Dan Ekonomi Di Kecamatan Pineleng Kabupaten Minahasa. *Agri-Sosioekonomi*, 13(2A), 335–342. <https://doi.org/https://doi.org/10.35791/agrsosek.13.2A.2017.17130>.